

**ANALISIS YURIDIS PRINSIP-PRINSIP PERJANJIAN
TERHADAP KONTRAK BAKU DALAM LALU LINTAS
BISNIS (Studi Pada Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit Bank
CIMB)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

AZIS KARIM SANTOSO

C100160187

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS PRINSIP-PRINSIP PERJANJIAN TERHADAP
KONTRAK BAKU DALAM LALU LINTAS BISNIS**

(Studi Pada Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit Bank CIMB)

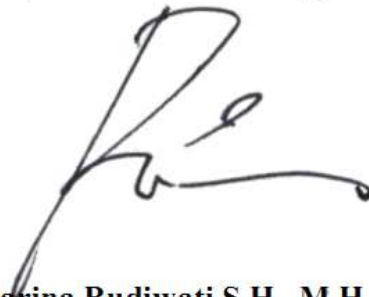
PUBLIKASI ILMIAH

oleh :

AZIS KARIM SANTOSO
C100160187

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Septarina', written in a cursive style.

(Septarina Budiwati S.H., M.H., C.N)

NIK/NIDN. 244/0621085801

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PRINSIP-PRINSIP PERJANJIAN TERHADAP
PERJANJIAN BAKU DALAM LALU LINTAS BISNIS
(Studi Pada Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit Bank CIMB)**

**OLEH
AZIS KARIM SANTOSO
C100160187**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis, 06 Mei 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji :

1. Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N. (.....)
(Ketua Dewan Penguji)
2. Darsono, S.H., M.H. (.....)
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Andria Luhur Prakoso, S.H., M.H., M.Kn. (.....)
(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan,
(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H.)

NIK.537 /NIDN.0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 06 Mei 2021

Penulis



AZIS KARIM SANTOSO

C100160187

ANALISIS YURIDIS PRINSIP-PRINSIP PERJANJIAN TERHADAP KONTRAK BAKU DALAM LALU LINTAS BISNIS (Studi Pada Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit Bank CIMB)

Abstrak

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Terdapat lima prinsip perjanjian yang dikenal oleh ilmu hukum perdata. Kelima prinsip tersebut adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*consensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), dan asas kepribadian (*personality*). Pihak Bank lazimnya juga membuat suatu perjanjian dalam setiap produk yang ditawarkannya, salah satunya adalah dalam produk kartu kredit. Perjanjian yang dibuat pada penerbitan kartu kredit dibuat dalam suatu perjanjian baku. Perjanjian baku adalah sebuah perjanjian yang didalamnya telah ditentukan secara sepihak dan isi dalam perjanjiannya. Meskipun banyak para ahli yang berpendapat bahwa perjanjian baku tidak sesuai dengan prinsip perjanjian, khususnya prinsip kebebasan berkontrak. Namun, perjanjian baku tetap dianggap legal dan wajar dalam lalu lintas bisnis karena adanya kebutuhan masyarakat dan tidak adanya hukum yang dengan tegas melarangnya.

Kata kunci: perjanjian, prinsip perjanjian, perjanjian baku, legal

Abstract

Based on Article 1313 of the Civil Code, an agreement is an act whereby one or more people bind themselves to one or more other people. There are five principles of agreement known to civil law. These principles are the principle of freedom of contract, the principle of consensualism, the principle of legal certainty (*pacta sunt servanda*), the principle of good faith, and the principle of personality. Banks usually make an agreement in every product it offers, one of which is in credit card products. The agreement made on the credit card publication is made in a standard agreement. A standard agreement is an agreement in which it has been determined unilaterally and the contents of the agreement. Although there are many experts who argue that the agreement is not in accordance with the principles of the agreement, especially the principle of freedom of contract. However, standard agreements remain law-friendly and reasonable in business traffic due to community needs and there is no law against them.

Keywords : agreement, agreement principle, standard agreement, legal

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan pesatnya kemajuan dan perkembangan kehidupan di era modern sekarang, kredit atau pinjaman dana bisa didapatkan melalui kartu kredit atau credit card, dan kartu kredit menjadi sebuah gaya hidup karena dianggap lebih

mudah dan prestis dalam penggunaannya (Ibrahim, 2004). Dalam penerbitan sebuah kartu kredit tentunya tidak dapat dilepaskan dari perikatan yang dibuat diantara kedua belah pihak, yaitu antara pihak bank dan nasabah, yang bersumber dari perjanjian. Perjanjian dalam KUHPdata diatur dalam Buku III tentang Perikatan, Bab Kedua, Bagian Kesatu sampai dengan Bagian Keempat. Pasal 1313 KUHPdata memberikan rumusan tentang “perjanjian” bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Ibrahim, 2004).

Terdapat 5 (lima) asas atau prinsip perjanjian yang dikenal dalam ilmu hukum perdata. Kelima asas atau prinsip itu diantaranya adalah : asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*consensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), dan asas kepribadian (*personality*). Jadi sudah selazimnya dalam pembuatan suatu perjanjian perlu memperhatikan 5 (lima) asas atau prinsip perjanjian di atas (Muhtarom, 2014).

Perjanjian penerbitan kartu kredit /credit card, lazimnya dibuat dalam suatu perjanjian baku. Perjanjian baku adalah sebuah perjanjian yang didalamnya telah ditentukan secara sepihak dan isi dalam perjanjiannya terdapat sejumlah klausula-klausula yang membebaskan kreditur dari kewajibannya (eksonerasi klausula). Setiap bank telah menyiapkan blanko (formulir, model). Perjanjian Kartu Kredit, yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu (standar form), yang kemudian formulir tersebut disodorkan kepada setiap pemohon kartu kredit dimana isinya tidak dibicarakan terlebih dahulu dengan pemohon, dengan alasan efisiensi dalam penggunaan biaya, tenaga dan waktu (Badrulzaman, 2009).

Mengenai perjanjian baku dalam penerbitan kartu kredit, memang tidak ada ketentuan khusus dalam Undang-Undang Perbankan yang mengatur mengenai isi perjanjiannya. Namun, dalam membuat suatu perjanjian sudah semestinya dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas-asas perjanjian yang berlaku. Asas atau prinsip tersebut, yaitu asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*consensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), dan asas kepribadian (*personality*). Dengan demikian, diharapkan bahwa sebuah perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh

para pihak tidak mengakibatkan kerugian kepada pihak manapun, baik itu pihak pemohon kartu kredit maupun pihak penerbit (Bank) setelah penandatanganan atas perjanjian tersebut.

2. METODE

Metode pendekatan yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini merupakan metode pendekatan doktrinal (normatif), yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dilihat dari sisi normatifnya. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode doktrinal (normatif) ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip-prinsip perjanjian terhadap sebuah perjanjian pembuatan kartu kredit di Bank CIMB, serta penggunaan kontrak baku dalam perjanjian penerbitan kartu kredit di Bank CIMB (Ibrahim, 2005).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Proses dan Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit di Bank CIMB

Dalam proses penerbitan kartu kredit pada Bank CIMB, pihak pemohon kartu kredit harus mengisi suatu formulir yang terdiri atas dua kolom, pada kolom pertama pemohon akan mengisi identitas diri terlebih dahulu. Kemudian pada kolom kedua pemohon akan menandatangani kolom “pernyataan pemohon”. Setelah pihak pemohon selesai mengisi kolom pertama, maka pihak pemohon akan menandatangani kolom kedua dari formulir yang berisi pernyataan pemohon yang isinya telah dibuat oleh pihak Bank. Bank kemudian menganalisis permohonan dari nasabah berdasarkan data yang diterima. Analisis yang dilakukan oleh Bank penerbit seperti halnya permohonan yang diajukan bagi fasilitas kredit pada umumnya. Yaitu menggunakan analisis 5C. Jika permohonan dinilai “layak” akan ditindak lanjuti oleh pihak bank dengan menerbitkan “kartu kredit” atas nama pemohon beserta kartu tambahan yang diminta.

Perjanjian penerbitan kartu kredit pada Bank CIMB dapat dimasukkan ke dalam jenis perjanjian timbal balik (*bilateral contract*). Didasarkan atas “Pernyataan Sebagai Pemohon” butir ke-13 perjanjian penerbitan kartu kredit, dimana disebutkan bahwa pihak pemohon kartu kredit mendapatkan fasilitas

pembiayaan/pinjaman dari Bank CIMB. Artinya pihak pemohon kartu kredit nantinya berhak mendapatkan pinjaman dari pihak Bank CIMB dan nantinya juga berkewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Kemudian pihak Bank CIMB nantinya berkewajiban memberikan fasilitas pinjaman kepada pihak pemohon kartu kredit, dan pihak Bank CIMB berhak mendapatkan pembayaran dari fasilitas pinjaman yang telah diberikan. Sesuai dengan pendapat dari Abdulkadir Muhammad, perjanjian timbal balik atau disebut juga *bilateral contract* merupakan suatu perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak (Muhammad, 1982).

Perjanjian penerbitan kartu kredit pada Bank CIMB termasuk dalam bentuk perjanjian baku. Karena perjanjian ini dibuat pada suatu formulir yang telah dibuat secara massal dan isi atau kalusulnya telah ditetapkan secara sepihak oleh Bank CIMB. Sebagaimana tertulis dalam penjelasan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, perjanjian baku adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal.

3.2. Penerapan Prinsip-Prinsip Perjanjian di dalam Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit Bank CIMB

3.2.1 Prinsip Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota menjadi dasar kebebasan setiap orang untuk membuat atau mengadakan perjanjian. Berikut adalah isi Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota : “*Bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*” Kata “semua” tersebut diartikan bahwa setiap orang dapat atau boleh membuat perjanjian apa saja, tidak terbatas pada jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdota (*Burgerlijk Wetboek*), dan perjanjian tersebut akan berakibat hukum mengikat para pihak yang membuatnya (Anand, 2011).

Perjanjian penerbitan kartu kredit pada Bank CIMB dapat dikategorikan sebagai bentuk perjanjian baku. Hal ini dikarenakan perjanjian tersebut disiapkan dalam bentuk formulir dan isinya atau kalusul-klausulnya telah disiapkan oleh

pihak Bank CIMB. Pihak pemohon kartu kredit nantinya hanya diberikan pilihan untuk menyetujui perjanjian tersebut atau menolaknya. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud Pada ayat 22 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal.

KUHPerdata belum memiliki ketentuan yang mengatur secara spesifik mengenai perjanjian baku. Namun, terdapat beberapa Undang-Undang yang memiliki ketentuan atau pasal yang mengatur mengenai perjanjian baku di dalamnya. Contohnya adalah Pasal 18 Ayat (1) UUPK dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Sebenarnya Pasal 22 ayat (3) hampir sama ketentuannya dengan pasal 18 ayat (2) UUPK yang sudah ada diatas. Dimana perjanjian baku itu diperbolehkan, namun tidak boleh memuat klausul eksonerasi di dalam perjanjian baku tersebut. Klausula eksonerasi adalah klausul yang membatasi, menghapus atau membebaskan tanggung jawab seseorang pada akibat hukum yang terjadi.

Dalam perjanjian baku kebebasan yang dapat diwujudkan hanyalah kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian serta kebebasan untuk memilih dengan siapa seseorang akan membuat suatu perjanjian. Sedangkan kebebasan untuk menentukan bentuk, isi, dan cara pembuatan perjanjian sudah ditentukan oleh satu pihak. Ada aliran yang menganggap bahwa perjanjian baku bukanlah merupakan perjanjian karena posisi pengusaha dalam perjanjian tersebut adalah sebagai pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*), sehingga syarat-syarat yang ditentukan adalah undang-undang, bukan perjanjian. Aliran ini didukung oleh Sluijter (Meliala, 2015).

Pitlo menyatakan bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian paksa (*dwang contract*). Walaupun perjanjian ini bertentangan dengan undang-undang, dan beberapa ahli hukum menolak perjanjian ini, pada kenyataannya kebutuhan masyarakat menghendaki adanya perjanjian ini, dan berlawanan dengan arah keinginan hukum. Stein mencoba menjawab permasalahan ini dengan

pendapatnya bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian atas dasar “fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu”. Maka, apabila debitor menerima dokumen perjanjian tersebut, ia berarti setuju dengan yang menjadi substansi perjanjian tersebut (Novenanty, 2016).

Para ahli mengetahui bahwa perjanjian baku tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Namun, terdapat kebiasaan dan kebutuhan di dalam lingkungan masyarakat dan lalu lintas bisnis terhadap perjanjian baku, pada akhirnya membuat perjanjian ini tetap mengikat para pihak. Selain itu tidak terdapat aturan hukum yang secara spesifik dan tegas melarang penggunaan perjanjian baku. Sehingga perjanjian baku dianggap sebagai suatu perjanjian yang wajar dan legal.

3.2.2 Prinsip Konsensualisme (*Consensualism*)

Asas konsensualisme dapat ditemukan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata, pasal tersebut menegaskan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah cukup dengan adanya kata sepakat antara para pihak. Asas atau prinsip konsensualisme juga menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, namun cukup dengan adanya kesepakatan diantara para pihak yang membuat atau mengadakan perjanjian. Kesepakatan ialah terjadinya persesuaian kehendak dan pernyataan diantara para pihak yang membuat atau mengadakan perjanjian (Abdullah, 2015).

Dalam perjanjian baku penerbitan kartu kredit Bank CIMB dapat dilihat, bahwa bentuk kesepakatan para pihak dengan adalah dengan menandatangani kolom yang telah disediakan diatas. Dengan demikian, konsensus atau kesepakatan dianggap terjadi apabila para pihak telah menandatangani kolom tanda tangan yang telah disediakan pada perjanjian baku diatas. Maka dapat disimpulkan bahwa, perjanjian baku penerbitan kartu kredit Bank CIMB ini telah menerapkan asas konsensualisme didalamnya.

3.2.3 Prinsip Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Menurut asas atau prinsip ini, suatu perjanjian dianggap menjadi undang-undang yang mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian. Selain itu, pihak ketiga maupun hakim juga harus menghormati dan tidak boleh mengintervensi substansi

perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang mengadakannya. Asas atau prinsip ini dapat dikatakan merupakan suatu kesimpulan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara (Salim, 2015).

Mengenai asas atau prinsip kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) pada perjanjian baku penerbitan kartu kredit Bank CIMB, maka asas atau prinsip ini berkaitan dengan hak dan juga kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak. Berdasarkan perjanjian penerbitan kartu kredit Bank CIMB dapat dilihat bahwa hak dan kewajiban pihak pemegang kartu kredit diatur dalam kolom yang bertuliskan “Hak serta Kewajiban Pemegang Kartu”, dimana di dalamnya terdapat 8 (delapan) butir kewajiban pemegang kartu dan 1 (satu) butir hak pemegang kartu kredit. Sedangkan untuk pihak Bank CIMB, memiliki kewajiban yang diatur dalam kolom yang bertuliskan “Hak serta Kewajiban Pemegang Kartu” pada butir ke-1 (satu). Kemudian pihak Bank CIMB memiliki hak yang dapat dilihat dalam kolom yang bertuliskan “Penagihan & Pembayaran” dimana mengenai pembayaran terdapat 11 (sebelas) butir ketentuan mengenai pembayaran.

3.2.4 Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*)

Prinsip itikad baik merupakan salah satu prinsip yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, hal ini sama persis dengan ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) tersebut, maka prinsip ini lebih menekankan itikad baik yang harus ada dalam tahap pelaksanaan suatu perjanjian, bukan dalam tahap ketika pembuatan suatu perjanjian (Fuady, 1999).

Prinsip itikad baik terbagi menjadi dua, yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif, mengartikan itikad baik sebagai kejujuran yang berasal dari sikap batin. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 530 dan juga Pasal 1338 ayat (3) (Meliala, 2007). Itikad baik objektif, mengartikan bahwa itikad baik adalah kepatutan dan masuk akal (*redelijkheid en billijkheid*). Artinya pelaksanaan perjanjian tidak hanya memandang substansi atau klausul yang terdapat di dalam perjanjian, namun juga memperhatikan keseimbangan dari keadaan serta kondisi masyarakat di sekitar (Harisa, 2018).

Berdasarkan prinsip itikad baik subjektif, maka itikad baik menyangkut niat awal dalam hati para pihak dalam melakukan perjanjian ini. Sehingga yang dapat mengetahui dengan jelas hanya lah pribadi dari masing-masing pihak saja. Meski begitu, pihak Bank CIMB merealisasikan itikad baiknya dengan cara mematuhi aturan perundang-undangan dan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku dalam pembuatan perjanjian baku tersebut. Hal ini dapat dilihat pada kalimat dibawah tanda tangan pihak pemohon kartu utama, kalimat tersebut berbunyi “Perjanjian ini telah dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan”. Dengan begitu perjanjian baku diatas pada dasarnya telah mematuhi peraturan yang berlaku yang mengatur mengenai perjanjian baku, khususnya pada perjanjian penerbitan kartu kredit. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa perjanjian baku dalam penerbitan kartu kredit pada Bank CIMB diatas telah memenuhi prinsip atau asas itikad baik.

3.2.5 Prinsip Kepribadian (*Personality*)

Asas atau prinsip kepribadian (*personality*) merupakan asas atau prinsip yang mengatur bahwa seseorang yang akan membuat dan/atau melakukan kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan atau dirinya sendiri saja. Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata adalah sumber dari asas atau prinsip ini. Pasal 1315 KUHPerdata yang isinya menegaskan bahwa : “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Dan isi dari Pasal 1340 KUHPerdata adalah sebagai berikut : “Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317.

Dalam perjanjian penerbitan kartu kredit diatas dapat kita lihat bahwa pihak pemohon kartu kredit mengadakan persetujuan dilakukan dengan dirinya sendiri tanpa diwakilkan oleh pihak manapun. Kemudian pihak Bank CIMB juga melakukan persetujuan dengan dilakukan oleh petugas yang berwenang untuk mengadakan perjanjian penerbitan kartu kredit tersebut. Maka dapat diartikan bahwa perjanjian penerbitan kartu kredit diatas telah sesuai dengan asas atau prinsip kepribadian dan juga ketentuan Pasal 1315 menunjuk pada kewenangan bertindak sebagai individu pribadi sebagai subyek hukum pribadi yang mandiri,

yang memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, dalam hal ini adalah para pihak pemohon kartu kredit dan petugas Bank CIMB.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan atas hasil penelitian dan pembahasan diatas, berikut adalah kesimpulan yang dapat penulis berikan: Pertama, proses dan perjanjian penerbitan kartu kredit di Bank CIMB - proses penerbitan kartu kredit pada Bank CIMB dapat dilakukan dengan mudah. Pemohon hanya perlu mengisi suatu formulir yang terdiri atas dua kolom, pada kolom pertama pemohon akan mengisi identitas diri terlebih dahulu. Kemudian pada kolom kedua pemohon akan menandatangani kolom “pernyataan pemohon”. Perjanjian penerbitan kartu kredit pada Bank CIMB dapat dimasukkan ke dalam jenis perjanjian timbal balik (*bilateral contract*). Didasarkan atas “Pernyataan Sebagai Pemohon” butir ke-13 perjanjian penerbitan kartu kredit, dimana disebutkan bahwa pihak pemohon kartu kredit mendapatkan fasilitas pembiayaan/pinjaman dari Bank CIMB. Artinya pihak pemohon kartu kredit nantinya berhak mendapatkan pinjaman dari pihak Bank CIMB dan nantinya juga berkewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Perjanjian penerbitan kartu kredit pada Bank CIMB dapat dikategorikan sebagai bentuk perjanjian baku. Pengertian perjanjian baku yang terdapat dalam penjelasan dari Pasal 22 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Berikut adalah pengertiannya, perjanjian baku sebagaimana dimaksud Pada ayat 22 ayat (1) adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal.

Kedua, penerapan prinsip-prinsip perjanjian di dalam perjanjian penerbitan kartu kredit Bank CIMB – Penerapan prinsip kebebasan berkontrak, perjanjian penerbitan kartu kredit ini termasuk dalam bentuk perjanjian baku maka kebebasan yang dapat diwujudkan hanyalah kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian serta kebebasan untuk memilih dengan siapa seseorang akan

membuat suatu perjanjian. Sedangkan kebebasan untuk menentukan bentuk, isi, dan cara pembuatan perjanjian sudah ditentukan oleh satu pihak. Namun, terdapat kebiasaan dan kebutuhan di dalam lingkungan masyarakat dan lalu lintas bisnis sehingga perjanjian baku dianggap sebagai suatu perjanjian yang wajar dan legal. Penerapan prinsip konsensualisme, konsensualisme dapat ditemukan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah cukup dengan adanya kata sepakat antara para pihak. Bentuk kesepakatan para pihak adalah dengan menandatangani kolom yang telah disediakan diatas. Dengan demikian, konsensus atau kesepakatan dianggap terjadi apabila para pihak telah menandatangani kolom tanda tangan yang telah disediakan pada perjanjian baku diatas. Penerapan prinsip kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), prinsip ini dapat dikatakan merupakan suatu kesimpulan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara). Pada perjanjian baku penerbitan kartu kredit Bank CIMB, maka prinsip ini berkaitan dengan hak dan juga kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak. Berdasarkan perjanjian penerbitan kartu kredit Bank CIMB dapat dilihat bahwa hak dan kewajiban pihak pemegang kartu kredit diatur dalam kolom yang bertuliskan “Hak serta Kewajiban Pemegang Kartu”. Sedangkan untuk Bank CIMB, memiliki kewajiban yang diatur dalam kolom yang bertuliskan “Hak serta Kewajiban Pemegang Kartu” pada butir ke-1 (satu) dan hak yang dapat dilihat dalam kolom yang bertuliskan “Penagihan & Pembayaran” dimana mengenai pembayaran terdapat 11 (sebelas) butir ketentuan. Penerapan prinsip itikad baik (*good faith*), berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) prinsip ini lebih menekankan itikad baik yang harus ada dalam tahap pelaksanaan suatu perjanjian. Pihak Bank CIMB merealisasikan itikad baiknya dengan cara mematuhi aturan perundang-undangan dan aturan OJK yang berlaku dalam pembuatan perjanjian baku tersebut. Hal ini dapat dilihat pada kalimat dibawah tanda tangan pihak pemohon kartu utama, kalimat tersebut berbunyi “Perjanjian ini telah dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan”.

4.2. Saran

Berdasarkan atas hasil penelitian dan pembahasan diatas, berikut adalah beberapa saran yang dapat penulis berikan: Diharapkan pihak Bank CIMB dalam melayani

pembuatan kartu kredit, dapat menjelaskan lebih detail kepada pihak pemohon kartu kredit mengenai produk yang ditawarkan termasuk manfaat, biaya, resiko, akad, serta persyaratan dan ketentuan. Hal ini dikarenakan penjelasan lebih detail mengenai hal tersebut sebenarnya terdapat pada sebuah link yang dicantumkan pada butir ke-14 “Pernyataan Pemohon”.

Kemudian untuk pihak masyarakat yang ingin mendapatkan kartu kredit diharapkan lebih jeli dan cermat untuk memperhatikan setiap manfaat, biaya, resiko, akad, serta persyaratan dan ketentuan yang biasanya telah dicantumkan oleh pihak Bank dalam suatu perjanjian pembuatan kartu kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Junaidi. (2015). *Analisis Asas Konsensualisme di Lembaga Keuangan Syariah*. <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADIA/article/download/960/989#:~:text=Asas%20konsensualisme%20atau%20asas%20kesepakatan,pihak%20yang%20terlibat%20di%20dalamnya>, diakses pada 2 September 2020
- Anand, Ghansam. (2011). *Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Penyusunan Kontrak*. <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/download/265/115>, diakses pada 2 September 2020
- Badruzaman, Mariam Darus. (2009). *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku*. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman
- Fuady, Munir. (1999). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Jakarta : P.T. Citra Aditya Bakti
- Harisa, Novran. (2018). *Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Arbitrase Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa*. https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/view/3722/pdf_1, diakses pada 3 September 2020
- Ibrahim, Johannes. (2004). *Kartu Kredit-Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*. Bandung: PT.Refika Aditama
- Ibrahim, Johnny. (2005). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
- Meliala, Djaja S. (2015). *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung : Nuansa Aulia
- Meliala, Syamsudin Qirom. (2007). *Pengertian Asas Itikad Baik di Dalam Hukum Indonesia*. Surabaya : Mitra Ilmu
- Muhammad, Abdulkadir. (1982). *Hukum Perikatan*. Bandung : Penerbit Alumni

- Muhtarom, M. (2014). *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4573/4-.pdf?sequence=1>, diakses 7 Maret 2020
- Novenanty, Wurianalya Maria. (2016). Perjanjian Baku Dalam Dunia Bisnis Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia. <http://journal.unpar.ac.id/index.php/melintas/article/download/2955/2528>, diakses pada 28 Januari 2021
- S, Salim H. (2015). *Hukum Kontrak : Teori dan Praktik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika